



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Reklame, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi saat ini sehingga perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

7

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7



8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;

7

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.
14. Sewa Titik adalah biaya yang dipungut dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap tempat dan/atau lokasi dimana bidang Reklame didirikan atau ditempel.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak

7



sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.

20. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. *Billboard* adalah bentuk promosi iklan luar ruang (*outdoor advertising*) dan memiliki ukuran 4 m x 8 m (empat meter kali delapan meter), 5 m x 10 m (lima meter kali sepuluh meter), 6 m x 12 m (enam meter kali dua belas meter) atau yang ukuran luasnya lebih dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat

7.

meter persegi) yang biasanya diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui.

27. Reklame *Vegatron/videotron* adalah *billboard* yang sudah sangat mengikuti kemajuan masa era digital terkini yang mana menampilkan isi iklan berupa gambar film atau video digital sebagai media utama.
28. Baliho adalah Reklame yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen atau semi permanen yang berukuran 4 m x 6 m (empat meter kali enam meter), isinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara (*event*) tertentu atau kegiatan yang bersifat insidentil.
29. Papan Bercahaya adalah papan Reklame yang penerangannya bersumber dari dalam (*backlite*) maupun dari luar (*frontlite*).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran;
- d. pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, baik yang

7



berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di Daerah.

- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menyampaikan kepada Wajib Pajak formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan, mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melengkapi persyaratan permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengelola;
  - b. surat Keterangan dari Kepala DPMPTSP terkait permohonan izin memasang Reklame;
  - c. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak daerah;
  - d. surat kuasa Penerima Kuasa apabila dikuasakan; dan
  - e. foto desain Reklame.
- (5) Setelah Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan formulir pendataan dengan jelas, lengkap, benar selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKPD.
- (6) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran dianggap sudah benar dan lengkap, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati.
- (7) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak daerah kedalam Buku Register Pendaftaran.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (9) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan data yang dimiliki oleh BPKPD.

7.

- (10) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak menghentikan usahanya yang menjadi dasar pendaftaran Wajib Pajak;
  - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; atau
  - c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, Wajib Pajak secara subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Kepala BPKPD mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak pribadi dan 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak harus melunasi tunggakan Pajaknya.

#### Pasal 6

- (1) Pemohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD melakukan penelitian administratif atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.





- (3) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitkan surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD.

#### Pasal 7

- (1) Pendataan Reklame dilakukan dengan mencocokkan jumlah SKPD dengan jumlah izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan jumlah Reklame di lapangan.
- (2) Kepala BPKPD melaksanakan pendataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan potensi Pajak dan dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan dengan instansi terkait.

#### Pasal 8

- (1) Hasil pendataan Reklame yang tidak membayar Pajak dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Bupati, Kepala DPMPTSP dan Kepala Satpol PP.

#### Pasal 9

- (1) Nilai Pajak ditetapkan berdasarkan nilai Sewa Titik.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara penghitungan pengenaan Pajak sebagai berikut:
- dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
  - untuk Reklame yang dipasang sendiri penghitungannya didasarkan pada nilai sewa yang terdiri dari jenis Reklame, kawasan tempat pemasangan, ukuran Reklame yang

7.

- dipasang, jangka waktu pemasangan dikalikan dengan tarif Pajak sebesar 20 % (dua puluh persen);
- c. dalam hal nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. nilai sewa kontrak dianggap tidak wajar yaitu jika hasil ketetapan nya masih dibawah nilai sewa Reklame yang ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - e. kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis dan besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN SKPDN

##### Pasal 11

- (1) Setelah pemohon mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), pemohon juga menyertakan surat keterangan penerbitan izin dari Kepala DPMPTSP dan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Petugas BPKPD memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7



- (3) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan nilai Sewa Titik.
- (4) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan petugas BPKPD.

#### Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal :
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  - c. kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung secara jabatan melalui pemeriksaan Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terhutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan

7.

- huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat bayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
  - (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (4) Jumlah Pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya Pajak.
  - (5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 14

Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPKPD untuk menandatangani STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Keputusan Pembetulan.

#### Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala BPKPD dapat menerbitkan STPD, dalam hal :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

7.



- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

#### Pasal 16

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Penyampaian STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan tanda terima disampaikan ke Bidang Pendataan dan Pelayanan BPKPD untuk diregistrasi/dicatat.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan pada Bendahara Penerimaan BPKPD hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Reklame insidentil, Wajib Pajak harus sudah mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh instansi yang

7.

berwenang berupa surat keterangan penerbitan izin sebelum melakukan pembayaran Pajak.

- (3) Reklame tetap yang menempel pada papan nama usaha yang menempel pada bangunan, Wajib Pajak harus sudah mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang berupa surat keterangan penerbitan izin sebelum melakukan pembayaran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lebar bangunan usaha tampak dari depan:

- 1) m - 2 m (satu meter sampai dengan dua meter), lebar papan nama usaha sama dengan lebar usaha dan tinggi 1 m (satu meter);
- 2) > 2 m – 4 m (lebih dari dua meter sampai dengan empat meter), lebar papan nama usaha 2 m (dua meter) dan tinggi 1 m (satu meter);
- 3) > 4 m – 6 m (lebih dari empat meter sampai dengan enam meter), lebar papan nama usaha 3 m (tiga meter) dan tinggi 1,5 m (satu koma lima meter);
- 4) > 6 m – 8 m (lebih dari enam meter sampai dengan delapan meter), lebar papan nama usaha 4 m (empat meter) dan tinggi 2 m (dua meter);
- 5) > 8 m (lebih dari delapan meter), lebar papan nama usaha minimal 6 m (enam meter) dan tinggi minimal 2 m (dua meter).

b. usaha dapat memasang papan Reklame sponsor dengan ukuran maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas papan nama usaha menempel.

- (4) Terhadap Reklame tetap berupa papan bertiang, Wajib Pajak harus sudah mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh instansi berwenang berupa surat keterangan penerbitan izin sebelum melakukan pembayaran Pajak;
- (5) Terhadap Reklame tetap berupa Papan Bercahaya Wajib Pajak sudah harus mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh instansi berwenang berupa surat keterangan penerbitan izin sebelum melakukan pembayaran Pajak;
- (6) Terhadap Reklame tetap berukuran lebih dari 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) harus mendapatkan izin penyelenggaraan Reklame dari Tim Reklame yang diterbitkan oleh instansi

7.



berwenang berupa surat keterangan penerbitan izin sebelum melakukan pembayaran Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari untuk penyelenggaraan Reklame terbatas dan/atau permanen terhitung sejak diterbitkan SKPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ditetapkan 1 (satu) hari untuk penyelenggaraan Reklame insidentil terhitung sejak diterbitkan SKPD.

#### Pasal 20

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDLB, SKPDKB, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

### BAB VI

#### PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan;

7

- b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak yang terutang; dan
  - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan yang dimohonkan;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
  - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup.





- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 24

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar keputusan untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VII

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian Reklame dilakukan terhadap setiap izin penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKPD, Kepala DPUTR, Kepala DPMPTSP, dan Kepala Satpol PP sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dilakukan berdasarkan aspek etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum, keamanan, kelaikan konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan pengawasan Reklame meliputi pemeriksaan pelaksanaan izin penyelenggaraan Reklame.

7.



- (2) Kegiatan pengendalian Reklame meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi administratif.

#### Pasal 28

- (1) Hasil pengawasan dan pengendalian Reklame dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Bupati, Kepala BPKPD dan Kepala Satpol PP.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Perhitungan Pajak yang masih dalam proses atau sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Pajak Reklame dihitung berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 7 November 2022  
Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 7 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd


**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

Contoh Formulir Pendaftaran

|  |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
|--|-----------|---|----------------|---------|-----------|----|----------------|---------|-----------|----|----------------|---------|-----------|----|----------------|---------|-----------|----|----------------|---------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
|   |           | PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
|  |           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
|  |           | Jl. Ngurah Rai No. 2 Telp. (0362) 3301977, Singaraja  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK REKLAME   |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Nomor :                    /                    /                    / 2021  |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Jenis Permohonan :   |           | <input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| I. Data Pemilik  |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 1. Nama Pemilik  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 2. Alamat  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 3. Kelurahan / Desa  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 4. Kecamatan   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 5. Kota/Kabupaten  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 6. Nomor Telepon   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| II. Data Wajib Pajak   |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 1. Nama Perusahaan / Biro Reklame  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 2. Alamat Perusahaan / Biro Reklame  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 3. Nama Pemilik / Penanggung Pajak   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 4. Alamat  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 5. Kelurahan / Desa  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 6. Kecamatan   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 7. Kota / Kabupaten  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 8. No Telepon / HP / Faks  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 9. NIK / NPWP  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 10. E-mail   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| III. Data Reklame  |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 1. Jenis Reklame   | :         | <input type="checkbox"/> a. Papan/Billboard <input type="checkbox"/> d. Selebaran<br><input type="checkbox"/> b. Kain <input type="checkbox"/> e. Berjalan termasuk kendaraan<br><input type="checkbox"/> c. Melekat/Sticker <input type="checkbox"/> f. Lainnya  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 2. Alamat / Tempat Pemasangan  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| a. Nama Tempat   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| b. Alamat Pemasangan   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| c. Kelurahan / Desa  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| d. Kecamatan   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| e. Kota / Kabupaten  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 3. Ukuran Reklame  | :         | <table><tr><td>Panjang</td><td>m X lebar</td><td>m=</td><td>m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Panjang</td><td>m X lebar</td><td>m=</td><td>m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Panjang</td><td>m X lebar</td><td>m=</td><td>m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Panjang</td><td>m X lebar</td><td>m=</td><td>m<sup>2</sup></td></tr><tr><td colspan="4">JUMLAH LUAS REKLAME</td></tr><tr><td colspan="4">m<sup>2</sup></td></tr></table> |                | Panjang | m X lebar | m= | m <sup>2</sup> | Panjang | m X lebar | m= | m <sup>2</sup> | Panjang | m X lebar | m= | m <sup>2</sup> | Panjang | m X lebar | m= | m <sup>2</sup> | JUMLAH LUAS REKLAME |  |  |  | m <sup>2</sup> |  |  |  |
| Panjang  | m X lebar | m=  | m <sup>2</sup> |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Panjang  | m X lebar | m=  | m <sup>2</sup> |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Panjang  | m X lebar | m=  | m <sup>2</sup> |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Panjang  | m X lebar | m=  | m <sup>2</sup> |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| JUMLAH LUAS REKLAME  |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| m <sup>2</sup>   |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 4. Jumlah Pemasangan   | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 5. Jangka Waktu Pemasangan   | :         | tanggal :                    s/d tanggal :  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 6. Jenis Produk Reklame  | :         | <input type="checkbox"/> a. Rokok<br><input type="checkbox"/> b. Minuman Berakohol<br><input type="checkbox"/> c. Produk Makanan/Minuman<br><input type="checkbox"/> d. Produk Kecantikan<br><input type="checkbox"/> e. Produk Perbankan<br><input type="checkbox"/> f. Produk Automotif<br><input type="checkbox"/> g. Lainnya  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 7. Letak Reklame   | :         | <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| 8. Isi Reklame (Foto Terlampir)  | :         |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| Petugas Penerima   |           | Singaraja,<br>Wajib Pajak / Penanggung Pajak  |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |
| NIP.   |           |   |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |         |           |    |                |                     |  |  |  |                |  |  |  |


Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b><br><b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jalan Ngurah Rai No.2 Telp ( 0362 ) 3437105 Singaraja |   |
|--|---|
| <b><u>NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH</u></b>   |   |
| NPWPD  | : |
| Nama Usaha   | : |
| Alamat   | : |
| An. Bupati Buleleng<br>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan<br>Pendapatan Daerah Kab.Buleleng   |   |

Depan

| <b><u>PERHATIKAN</u></b>  |
|---|
| 1. Kartu ini Harap Disimpan Baik-baik Dan Apabila Hilang<br>Agar Segera Melaporkan Ke Badan Pengelolaan Keuangan<br>dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng |
| 2. Kartu Ini Hendaknya Dibawa Apabila Saudara Akan<br>Melakukan Transaksi Perpajakan Daerah   |
| 3. Dalam Hal Wajib Pajak Pindah Domisili, Supaya<br>Melaporkan Diri Ke Badan Pengelolaan Keuangan<br>dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng                |

Belakang

---

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

DAFTAR KELAS KAWASAN REKLAME

A. KAWASAN PARIWISATA MELIPUTI:

1. KECAMATAN BANJAR, yaitu:
  - a. Desa Banjar;
  - b. Desa Banyuseri;
  - c. Desa Cempaga;
  - d. Desa Gobleg;
  - e. Desa Kaliasem;
  - f. Desa Kayuputih;
  - g. Desa Munduk;
  - h. Desa Pedawa;
  - i. Desa Sidatapa; dan
  - j. Desa Tigawasa.
2. KECAMATAN BULELENG, yaitu:
  - a. Desa Baktiseraga;
  - b. Desa Kalibukbuk;
  - c. Kelurahan Kampung Bugis;
  - d. Kelurahan Paket Agung;
  - e. Desa Tukad Mungga;
  - f. Kelurahan Kampung Kajanan; dan
  - g. Desa Anturan.
3. KECAMATAN BUSUNGBIU, yaitu:
  - a. Desa Bengkel;
  - b. Desa Bongancina;
  - c. Desa Kedis;
  - d. Desa Sepang Kelod;
  - e. Desa Subuk;
  - f. Desa Telaga;
  - g. Desa Tinggarsari;
  - h. Desa Tista;
  - i. Desa Titab;
  - j. Desa Umejero; dan
  - k. Desa Sepang.

7

4. KECAMATAN GEROKGAK, yaitu :
  - a. Desa Gerokgak;
  - b. Desa Pejarakan;
  - c. Desa Pemuteran;
  - d. Desa Pengulon;
  - e. Desa Sanggalangit;
  - f. Desa Sumberkima; dan
  - g. Desa Tinga-tinga.
5. KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, yaitu :
  - a. Desa Bengkala;
  - b. Desa Bontihing;
  - c. Desa Bulian;
  - d. Desa Depehe;
  - e. Desa Mengening;
  - f. Desa Pakisan;
  - g. Desa Tambakan;
  - h. Desa Tamblang;
  - i. Desa Kubutambahan; dan
  - j. Desa Bukti.
6. KECAMATAN SAWAN, yaitu :
  - a. Desa Bebetin;
  - b. Desa Giri Emas;
  - c. Desa Jagaraga;
  - d. Desa Lemukih;
  - e. Desa Menyali;
  - f. Desa Sangsit;
  - g. Desa Sekumpul;
  - h. Desa Sudaji; dan
  - i. Desa Sawan.
7. KECAMATAN SERIRIT, yaitu :
  - a. Kelurahan Seririt.
8. KECAMATAN SUKASADA, yaitu :
  - a. Desa Ambengan;
  - b. Desa Gitgit;
  - c. Desa Kayuputih;
  - d. Desa Pancasari;
  - e. Desa Panji;
  - f. Desa Panji Anom;
  - g. Desa Pegadungan;

7.



- h. Desa Sambangan;
  - i. Desa Silangjana; dan
  - j. Desa Wanagiri.
9. KECAMATAN TEJAKULA, yaitu:
- a. Desa Bondalem;
  - b. Desa Julah;
  - c. Desa Les;
  - d. Desa Madenan;
  - e. Desa Pacung;
  - f. Desa Sambirenteng;
  - g. Desa Sembiran;
  - h. Desa Tejakula;
  - i. Desa Tembok; dan
  - j. Desa Penuktukan.

**B. KAWASAN PERKOTAAN MELIPUTI:**

- 1. Seluruh Kelurahan Se Kabupaten Buleleng.
- 2. Sepanjang Jalan Singaraja – Gilimanuk;
- 3. Sepanjang Jalan Singaraja – Pancasari; dan
- 4. Sepanjang Jalan Singaraja - Tejakula.

**C. KAWASAN LAINNYA:**

Yaitu yang tidak termasuk Kawasan Pariwisata dan Perkotaan.

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 54 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 REKLAME

Jenis Dan Besaran Nilai Sewa Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame Yang  
 Dipasang Sendiri

| NO  | JENIUS REKLAME     | KAWASAN    | SATUAN | TARIF PAJAK = 20% X NILAI SEWA |              |              |               |
|-----|--------------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|     |                    |            |        | HARIAN                         | MINGGUAN     | BULANAN      | TAHUNAN       |
|     |                    |            |        | RP                             | RP           | RP           | RP            |
| 1.  | MEGATRON/VIDEOTRON | PARIWISATA | M2     |                                | 278.000,00   | 1.138.000,00 | 10.000.000,00 |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     |                                | 278.000,00   | 1.138.000,00 | 10.000.000,00 |
|     |                    | LAINNYA    | M2     |                                | 210.000,00   | 926.000,00   | 10.000.000,00 |
| 2.  | BILLBOARD          | PARIWISATA | M2     |                                | 112.000,00   | 455.000,00   | 4.000.000,00  |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     |                                | 112.000,00   | 455.000,00   | 4.000.000,00  |
|     |                    | LAINNYA    | M2     |                                | 84.000,00    | 370.000,00   | 4.000.000,00  |
| 3.  | LED                | PARIWISATA | M2     |                                | 85.000,00    | 85.000,00    | 750.000,00    |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     |                                | 85.000,00    | 85.000,00    | 750.000,00    |
|     |                    | LAINNYA    | M2     |                                | 69.000,00    | 69.000,00    | 750.000,00    |
| 4.  | PAPAN              | PARIWISATA | M2     | 5.000,00                       | 32.000,00    | 131.000,00   | 1.152.000,00  |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     | 5.000,00                       | 32.000,00    | 131.000,00   | 1.152.000,00  |
|     |                    | LAINNYA    | M2     | 3.600,00                       | 26.000,00    | 114.000,00   | 1.240.000,00  |
| 5.  | PAPAN BERCAHAYA    | PARIWISATA | M2     | 6.000,00                       | 42.000,00    | 180.000,00   | 2.052.000,00  |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     | 6.000,00                       | 42.000,00    | 180.000,00   | 2.052.000,00  |
|     |                    | LAINNYA    | M2     | 5.000,00                       | 32.000,00    | 120.000,00   | 1.400.000,00  |
| 6.  | BALIHO             | PARIWISATA | M2     | 200.000,00                     | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |               |
|     |                    | PERKOTAAN  | M2     |                                |              |              |               |
|     |                    | LAINNYA    | M2     |                                |              |              |               |
| 7.  | LAYAR /SPANDUK     | PARIWISATA | M2     | 12.000,00                      | 75.000,00    | 300.000,00   |               |
|     | UMBUL-UMBUL DAN    | PERKOTAAN  | M2     | 9.000,00                       | 60.000,00    | 240.000,00   |               |
|     | SEJENISNYA.        | LAINNYA    | M2     | 8.000,00                       | 45.000,00    | 200.000,00   |               |
| 8.  | TEMPEL/PLAT/TEMBOK |            | M2     | 6.000,00                       | 37.500,00    | 150.000,00   | 2.000.000,00  |
| 9.  | SELEBARAN          | UNIT       |        |                                |              |              | 500.000,00    |
| 10. | KENDARAAN          |            |        |                                |              |              | 2.000.000,00  |

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah

| PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG<br>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG<br>JL. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977<br>singaraja                     |                       |        | SKPD<br>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)<br>Masa pajak :<br>Tahun : |             |           |          |             |                  | No. Urut<br><div></div>       |  |
|---|-----------------------|--------|---|-------------|-----------|----------|-------------|------------------|-------------------------------|--|
| Nama :<br>Alamat :<br>NPWPD :   |                       |        | <div></div>   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| Jatuh tempo Pembayaran :  |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| No  | Jenis dan Isi Reklame | Lokasi | Perhitungan pajak   |             |           |          |             |                  | Pajak terhutang (20%x4x7x8x9) |  |
|   |                       |        | JUMLAH  | PANJANG (m) | LEBAR (m) | LUAS (m) | MUKA (sisi) | NILAI SEWA (Rp.) |                               |  |
| 1   | 2                     | 3      | 4   | 5           | 6         | 7        | 8           | 9                | 10                            |  |
|   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        | Jumlah ketetapan pokok  |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        | Jumlah sanksi : a. bunga  |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        | b. Kenaikan   |             |           |          |             |                  |                               |  |
|   |                       |        | Jumlah keseluruhan  |             |           |          |             |                  |                               |  |
| Dengan huruf  |                       |        | <div></div>   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| <b>PERHATIAN</b>  |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| 1. Harap penyeteran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| 2. Terlambat menyeter dari tanggal batas penyeteran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| ....., Tahun .....  |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng  |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| <div></div>   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |
| NIP .   |                       |        |   |             |           |          |             |                  |                               |  |

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

a. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG<br>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN BULELENG<br>Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja  | SKPDKB<br>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH<br>KURANG BAYAR)<br>Masa pajak :<br>Tahun : | No. Urut<br><div></div> |
| Nama :<br>Alamat :<br>NPWPD :<br>Tanggal jatuh tempo :  |   |                         |
| <div></div>   |   |                         |
| I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :<br>Kode Pajak :<br>Nama Pajak :  |   |                         |
| II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :<br>1. Dasar pengenaan Rp.<br>2. Pajak yang terutang Rp.<br>3. Kredit Pajak :<br>a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.<br>b. Setoran yang dilakukan Rp.<br>c. Lain-lain RP.<br>d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.<br>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d) Rp.<br>5. Sanksi Administratif :<br>a. Bunga Rp.<br>b. Kenaikan Rp.<br>c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.<br>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp. |   |                         |
| Dengan hutuf  |   |                         |
| PERHATIAN   |   |                         |
| 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).<br>2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.  |   |                         |
| ....., Tahun.....<br>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Buleleng<br><br>NIP.  |   |                         |
| -----Gunting disini-----  |   |                         |
| TANDA TERIMA  |   |                         |
| NPWPD :<br>Nama :<br>Alamat :   |   |                         |
| ....., Tahun.....<br>Yang menerima<br>(.....)   |   |                         |

7.



b. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

|  |  |   |
|--|--|---|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN<br>BULELENG<br>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN BULELENG<br>Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 Singaraja  | <b>SKPDKBT</b><br>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH<br>KURANG BAYAR TAMBAHAN)<br><b>Masa pajak :</b><br><b>Tahun :</b> | No. Urut<br><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> |
| Nama :<br>Alamat :<br>NPWPD : <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div>  |  |   |
| Tanggal jatuh tempo :  |  |   |
| I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :<br>Kode Pajak : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div><br>Nama Pajak :                   |  |   |
| II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :   |  |   |
| 1. Dasar pengenaan   | Rp.  |   |
| 2. Pajak yang terutang   | Rp.  |   |
| 3. Kredit Pajak :  |  |   |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya  | Rp.  |   |
| b. Setoran yang dilakukan  | Rp.  |   |
| c. Lain-lain   | Rp.  |   |
| d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)   |  | Rp.   |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3d)   | Rp.  |   |
| 5. Sanksi Administratif :  |  |   |
| a. Bunga   | Rp.  |   |
| b. Kenaikan  | Rp.  |   |
| c. Jumlah sanksi administratif (a+b)   |  | Rp  |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)  |  | Rp  |
| Dengan huruf <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div>   |  |   |
| <b>PERHATIAN</b>   |  |   |
| 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).<br>2. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. |  |   |
| ..... Tahun.....<br>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Buleleng  |  |   |
| _____<br>NIP.  |  |   |
| -----Gunting disini-----   |  |   |
| <b>TANDA TERIMA</b>  |  |   |
| NPWPD : .....<br>Nama : .....<br>Alamat : .....  | No. SKPDKBT .....<br><br>..... Tahun.....<br>Yang menerima   |   |

c. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

|  |   |  |             |                         |             |
|--|---|--|-------------|-------------------------|-------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG<br>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN BULELENG<br>JL. Ngurah Rai no. 2 / (0362) 3301977 singaraja                                  |   | SKPDN<br>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)<br>Masa pajak :<br>Tahun : |             | No. Urut<br><div></div> |             |
| Nama   | : |  |             |                         |             |
| Alamat   | : |  |             |                         |             |
| NPWPD  | : | <div></div>  | <div></div> | <div></div>             | <div></div> |
| <div>I. Berdasarkan Pasal..... Undang-Undang no. 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :<br/>Kode Pajak : <div></div><br/>Nama Pajak :</div> |   |  |             |                         |             |
| <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</div>  |   |  |             |                         |             |
| 1. Dasar pengenaan   |   | Rp.  |             |                         |             |
| 2. Pajak yang terutang   |   | Rp.  |             |                         |             |
| 3. Kredit Pajak  |   |  |             |                         |             |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya  |   | Rp.  |             |                         |             |
| b. Setoran yang dilakukan  |   | Rp.  |             |                         |             |
| c. Lain-lain   |   | Rp.  |             |                         |             |
| d. STP(pokok)  |   | Rp.  |             |                         |             |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)   |   | Rp.  |             |                         |             |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)  |   | Rp.Nihil   |             |                         |             |
| <div>.....,Tahun.....<br/>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan<br/>dan Pendapatan Daerah<br/>Kabupaten Buleleng</div> <div>NIP.</div>   |   |  |             |                         |             |
| <div>----- gunting disini -----</div>  |   |  |             |                         |             |
| TANDA TERIMA   |   |  |             | No. STPD .....          |             |
| NPWPD  | : | .....  |             |                         |             |
| Nama   | : | .....\   |             |                         |             |
| Alamat   | : | .....  |             |                         |             |
| <div>....., Tahun .....</div> <div>Yang menerima</div> <div>.....</div>  |   |  |             |                         |             |

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

Contoh Surat Setoran Pajak Daerah

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG<br>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN<br>PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG<br>Jl. Ngurah Rai no. 2/ (0362) 3301977 singaraja   |   | SSPD<br>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)<br>Tahun ..... |   |            |
| Nama :<br>Alamat :<br>Jenis pungutan :<br>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |   |   |   |            |
| Menyetor berdasarkan*) <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain<br><input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD<br><input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan<br><input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan                    |   |   |   |            |
| : Masa Pajak :.....Tahun.....   |   |   |   |            |
| No.   | Nomor Rekening  | Pokok Pajak   | Sanksi/Adm Denda                            | Jumlah Rp. |
|   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |            |
|   |   |   |   |            |
|   |   | Jumlah pajak  |   |            |
| Dengan huruf  |   |   |   |            |
| Ruang untuk teraan<br>Kas Register/<br>tanda tangan<br>Petugas Penerima   | Diterima oleh,<br>Petugas tempat pembayaran<br>Tanggal<br>Tanda tangan<br>Nama terang |   | ..... Tahun.....<br>Penyetor<br><br>(.....) |            |
| *) Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> sesuai dengan ketentuan yang memiliki<br>MODEL. DLD- 12   |   |   |   |            |

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA